

Negara dalam Arus Pendisiplinan Pasar

Oleh Adde M Wirasenjaya

PADA tahun 1954, seorang antropolog muda dari Amerika ke tanah Jawa. Sang antropolog diberikan tugas meneliti “mengapa Jawa tidak berhasil mencapai evolusi pertanian yang akan menyiapkan tahap menuju industrialisasi?” Antropolog itu, Clifford Geertz

FAKTA menarik yang disajikan buku Simpson adalah dikirimnya antropolog muda Clifford Geertz ke Indonesia tahun 1954 untuk mengerjakan sebuah proyek “mengapa Jawa tidak berhasil mencapai evolusi pertanian yang akan menyiapkan tahap menuju industrialisasi.” Geertz kemudian melakukan riset mendalam dan melahirkan buku yang amat berpengaruh dalam ilmu sosial Indonesia bahkan hingga hari ini, *Agricultural Involution*. Intinya, buku tersebut menyusun secara detail tentang watak dan karakteristik orang Jawa yang menjadi kultur dominan di Indonesia, dalam menerima gagasan modernisasi. Dan Geertz, tak lain dan tak bukan, adalah murid Talcott Parsons, seorang ilmuwan yang memiliki pengaruh kuat dalam gagasan modernisasi. Dan modernisasi adalah, “rumah gagasan” bagi ide-ide neoliberalisme.

LAPORAN harian ini tentang banyaknya bantuan yang diberikan lembaga donor internasional terhadap sejumlah lembaga pemerintah semakin menegaskan tentang makin mendalamnya upaya pengarusutamaan (*mainstreaming*) terhadap negara oleh rezim neoliberal. Hampir luput dari perhatian publik, di kompleks gedung DPR, selain berkantor para wakil rakyat kita, berkantor pula sejumlah wakil lembaga-lembaga donor internasional. Tak heran jika sejumlah pegiat masyarakat sipil mempertanyakan keberadaan kantor lembaga-lembaga pemberi bantuan tersebut (*Kompas*, 19/4). Pada akhirnya, laporan tersebut semakin menegaskan bahwa instruksi struktur eksternal terhadap kedaulatan negara semakin mengalami pendalaman.

Senyatanya, sejarah interaksi negara dengan rezim kapitalis global di negeri ini menunjukkan bahwa konstruksi negara merupakan hasil proses “training capitalism.” Konsep dan gagasan tentang negara bangsa (*nation*) boleh jadi memiliki jejaknya yang

panjang dalam perjuangan anak negeri dan para *founding fathers* republik, namun gagasan tentang negara (*state*), sesungguhnya merupakan hasil konstruksi eksternal. Maka gagasan *nation-state*, pada dirinya sendiri, adalah sebuah pergulatan.

Sejak Orde Baru naik tahta, proses pendisiplinan negara oleh dunia luar semakin terasa. Bradley R Simpson dalam bukunya, *Economic with Guns: Authoritarian Development and US-Indonesian Relations (1960-1968)* secara menarik menunjukkan bahwa konstruksi negara Orde Baru dan seluruh gagasan pembangunan yang diproduksi rejim tersebut memiliki hubungan kuat dengan pandangan dunia (*world view*), khususnya gagasan Amerika Serikat tentang politik global. Kesungguhan Amerika mengkonstruksi negara mencerminkan perhatian negeri adi daya tersebut untuk menjaga kepentingannya dalam waktu yang amat panjang. Konstruksi Amerika atas Indonesia dilakukan melalui upaya yang sistematis dan intensif. Tidak hanya dalam bidang ekonomi dan militer, Amerika bahkan memberi perhatian pada aspek indigen.

Dari Pendiplinan Ekonomi ke Pendisiplinan Politik

Pasca Orde Baru, negara tumbuh ketika rezim neoliberal mengalami konsolidasi. Demokrasi merupakan proyek yang mendapat perhatian intensif dari lembaga-lembaga pemberi bantuan internasional dalam satu dasawarsa terakhir. Dalam Konferensi yang diselenggarakan negara-negara yang tergabung dalam *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* di Paris tahun 2005, disepakati tentang “Deklarasi Paris untuk Efektivitas Bantuan”. Deklarasi tersebut mencerminkan perubahan orientasi dan perluasan dimensi bantuan dari wilayah ekonomi ke non-ekonomi. Di bawah tema besar “assessing democracy”, proyek pengarusutamaan demokrasi dilakukan dalam skala yang luas. Bantuan terhadap proses demokrasi Indonesia menyita porsi yang amat besar. Bahkan menurut Edward Asprinall (2010), sebenarnya yang menerima bantuan bagi proyek demokrasi bukan hanya lembaga-lembaga negara, namun juga *civil society organizations (CSO)* di Indonesia.

Perubahan orientasi tersebut semakin melengkapi pendisiplinan ekonomi yang dianggap “cukup sukses” mengintegrasikan negara ke dalam rezim perdagangan internasional antara lain melalui penyebaran Konsensus Washington Ini merupakan proses ganda bagi proses pengarusutanamaan ideologi neoliberal di negara-negara berkembang. Proses pendisiplinan ganda ini merupakan upaya untuk meneguhkan

bekerjanya mekanisme pasar bebas dengan jalan mereduksi berbagai ganjalan politik di tingkat domestik. Keyakinan ini sepenuhnya menggambarkan semangat rejim neoliberal yang ingin membangun keintiman baru antara entitas negara dan pasar.

Pada masa Orde Baru negara menjadi agen penting bagi proses akumulasi modal. Di lain pihak, rezim pemberi bantuan tetap menjaga hubungan tersebut dengan tidak terlalu konsen pada agenda-agenda politik domestik. Terdapat separasi atau pemisahan antara aspek ekonomi dan politik dari rezim ekonomi internasional pada saat itu. Dalam beberapa aspek, hal ini menyumbang bagi proses stabilitas makro ekonomi. Namun dari aspek lainnya, pola ini membuat persoalan-persoalan pelanggaran politik seperti isu hak asasi manusia dan demokratisasi dibebankan sebagai urusan domestik.

Untuk menjaga harmoni negara dan rejim kapitalis waktu itu, negara mengkontruksi identitas politik yang khas pada masa Orde Baru, yang oleh para pengamat politik disebut massa mengambang (*floating mass*). Massa mengambang sebenarnya adalah massa yang identitasnya dibentuk dari luar – dalam hal ini melalui negara dan agen-agenya terutama militer dan birokrasi. Dengan cara itu, negara mencegah hadirnya identitas lain yang berbasis pada pengalaman dan ideologi politik di luar ideologi yang ada. Secara genealogis, massa mengambang merepresentasikan cara pandang kekuasaan yang militeristik. Konsep tersebut antara lain berasal dari seorang militer-pemikir yang berpengaruh pada masa Orde Baru, Ali Moertopo. Dalam asumsi Moertopo, massa mengambang lahir karena sesuatu yang rasional: “...sudah selayaknya bila rakyat, yang sebagian besar terdiri atas rakyat di pedesaan, dialihkan perhatiannya dari masalah politik dan ideologi sempit dan diarahkan kepada usaha pembangunan nasional,” tulis Moertopo (*dalam Dhakidae, 2003: 670*). Ada semacam logika bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa berlangsung dalam situasi politik yang tertib. Pembangunan nasional dipahami dalam konteks tiadanya identitas-identitas yang terlalu banyak bersaing, dan jika perlu dilakukan proses penyeragaman. Cara pandang Moertopo kemudian mendorongnya mengkontruksi aktor-aktor yang efisien, yang memudahkan bekerjanya pasar, menjaga harmoni antara pemodal global dan negara sebagai kompratiotnya.

Selama kurang lebih tiga dasa warsa, massa mengambang telah menjadi identitas yang memberi peran negara menjalankan fungsinya sebagai agen rezim

kapitalis global. Sampai batas tertentu, desain massa mengambang menjadi efektif membentuk depolitisasi masyarakat. Namun, dari sisi identitas politik, sebenarnya pola tersebut tidak benar-benar membungkan tumbuhnya identitas lain di luar kehendak negara. Massa mengambang dipandang perlu kehadirannya agar potensi resistensi bisa diredam dan stabilitas tatanan bisa dipelihara.

Konstruksi negara tentang massa mengambang kini berakhir seiring dengan ledakan liberalisasi politik yang melanda Indonesia. Dalam arena demokrasi yang amat liberal, semua identitas politik muncul nyaris tanpa kendali. Beberapa kelompok partikelir bahkan muncul dengan mencoba mengkonstruksi ide tentang negara “yang lain”. Pada saat yang sama, kedaulatan negara secara sistematis mengalami pendisiplinan yang berujung pada lemahnya negara dalam menjalankan agenda kesejahteraan. Pendisiplinan negara oleh rezim ekonomi global telah mengakhiri cerita massa mengambang, namun eksemplar negara mengambang sedang dimulai.

Jika massa mengambang membawa akibat pada hilangnya identitas masyarakat dalam berpolitik karena dianggap menyimpan resistensi atas rezim, negara mengambang berada pada logika serupa: dengan membangun identitas negara ke dalam identitas demokrasi kosmopolitan, potensi negara sebagai agen perlawanan atas rezim global akan mudah direduksi, terlebih ketika proyek privatisasi bekerja secara optimal sehingga negara benar-benar tak memiliki kekuatan lagi. Negara mengambang bukanlah konsekuensi. Ia adalah konstruksi yang konsisten dengan keinginan rezim neoliberal menjaga supaya pasar bisa bekerja di muka bumi. Negara mengambang adalah negara yang lemah baik ke luar maupun ke dalam karena harus mengakomodasi politik demokratis pada satu sisi, di sisi lain juga harus kompromistis – jika tak ingin disebut takluk – pada *blue print* pembangunan yang didesain oleh rejim eksternal. ***

Adde M Wirasenjaya,

*Pengajar Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Menulis tesis tentang “Floating State: Relasi Negara dan Rejim Neoliberal di
Indonesia Pasca Orde Baru” di Pasca Sarjana UGM.*

TENTANG PENULIS

Adde Marup Wirasenjaya lahir di Pandeglang, 17 Oktober 1972. Mengajar mata kuliah demokrasi, globalisasi dan teori pembangunan di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menyelesaikan studi master dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Menulis esai, opini di berbagai media massa seperti Kompas, Koran Tempo dan Jawa Pos. Kini tinggal di Bantul, Yogyakarta.

